

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata komunikasi secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *communication*. *Communication* sendiri berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti “sama atau sama makna”, *communico* atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*) (siapa). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang dikatakan paling banyak digunakan sebagai asal-usul dari kata komunikasi. Komunikasi merupakan proses berbagi makna dalam bentuk pesan komunikasi antara pelaku komunikasi.

Komunikasi adalah pesyarat kehidupan manusia, tidak ada komunikasi membuat kehidupan manusia hampa, jika tidak ada komunikasi maka interaksi antar manusia baik secara perorangan, kelompok, bahkan organisasi tidak dapat terjadi. Komunikasi dikatakan dua orang melakukan interaksi karena adanya aksi dan reaksi (Harun, 2012:19).

Komunikasi pemerintah adalah penyampaian ide , program dan gagasan pemerintah desa kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan. komunikasi pemerintah menjamin berjalannya fungsi pemerintah melalui keterampilan berkomunikasi, terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup . Komunikasi pemerintah menjadi sesuatu keniscayaan agar arus informasi, media komunikasi dan perubahan sosial yang terjadi dapat memberikan nilai manfaat serta berkolerasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka salah satu tugas pemerintahan desa adalah melaksanakan pembangunan desa terutama dalam pembangunan infrastruktur. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Keaktifan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur hendaknya disertai dengan usaha untuk memperbesar peranan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan infrastruktur, karena tanpa keterlibatan masyarakat akan terjadi kurang-efektifan pembangunan infrastruktur.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa, desa tidak lagi sebagai bawahan daerah tetapi sebaliknya desa dan masyarakatnya berhak atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang social, politik dan ekonomi. Desa sebagai unit pemerintah terkecil di dalam kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pasal 3 butir (j) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai pengertian yakni “turut berperan aktif dalam suatu kegiatan”. Diakomodasinya asas kemudian diwujudkan dalam tujuan pengaturan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4. Dalam pasal 4 butir (d) disebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah “untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama”. Selanjutnya, dalam Pasal 4 butir (i) juga disebutkan bahwa tujuan pengaturan desa adalah untuk “memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan”.

Perwujudan partisipasi tersebut juga terdapat terdapat dalam bagian hak dan kewajiban masyarakat desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa sehingga mampu menunjang sebuah kesatuan masyarakat yang partisipatif.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi desa mengingat selama ini dalam berbagai macam Undang-Undang yang mengatur tentang desa, partisipasi masyarakat tidak diakomodasi.

Menurut Yadav dalam Theresia (2015:198) menjelaskan bahwa ada empat macam partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemantauan hasil dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Desa sampali merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini berbatasan dengan desa lain yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Cinta Rakyat dan Desa Tanjung Rejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sei Tuan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sampali dan Desa Kolam dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Deli. Jarak Desa sampali dengan pusat pemerintah kota adalah 16 km dengan menempuh jarak tempuh menggunakan

kendaraan bermotor selama 30 menit. Desa sampali merupakan daerah yang luas dan dipenuhi dengan dataran. Luas wilayah desa sampali 2.393 Ha, terdiri area pemukiman penduduk, area industry, pusat pemberlanjaan, perumahan elite dan sebagainya. Penduduk desa sampali terdapat berbagai macam suku yang bertempat tinggal di sekitarnya.

Menurut pengamatan penulis sebagai observasi awal di lokasi penelitian permasalahan ini menunjukkan pembangunan infrastruktur desa Sampali belum seluruhnya merata terlaksanakan dengan baik. Pembangunan infrastruktur terutama jalan, jembatan dan drainase. Kondisi jalan di desa sampali baik jalan gang-gang maupun menuju kota atau kecamatan masih beralaskan bebatuan, belubang sehingga masyarakat atau pengendara akan merasa tidak nyaman jika melintasi jalan tersebut sehingga aktivitas masyarakat terganggu. Desa sampali merupakan desa sangat luas tetapi tidak adanya jembatan, atau jembatan yang rusak tidak memudahkan masyarakat beraktivitas antar dusun maupun antar desa, jembatan di desa berfungsi sebagai penghubung, memberi kemudahan penggerak antar desa, mempercepat aktivitas masyarakat diwilayahnya serta membuka isolasi daerah yang terpisahkan sungai. Desa sampali sering terjadi banjir diakibatkan sampah menumpuk sehingga dibutuhkan drainase untuk mengatasinya. Kepala desa mengatakan menjadikan sampali dua tahun kedepan menjadi desa wisata, maka dari itu dibutuhkan jalan, jembatan sebagai penghubung yang memudahkan masyarakat luar menuju Desa Sampali dan desa yang tidak banjir. Selain itu juga permasalahan keterbatasan dan ketidakmerataan dari pemerintah desa dalam memberikan

informasi pembangunan infrastruktur desa. Rendahnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi yang efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur. Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan infrastruktur melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komunikasi ini harus mengedepankan sikap aspiratif, konsultatif dan relationship. Karena pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya hubungan sinergis antara pelaku dan obyek pembangunan infrastruktur. Agar pembangunan infrastruktur berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu pusat komunikasi yang menjadi rujukan dari pelaku-pelaku pembangunan infrastruktur maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur untuk memperoleh informasi dan koordinasi pembangunan infrastruktur secara terpadu melalui strategi komunikasi pemerintahan desa. Peningkatan partisipasi masyarakat bergantung pada komunikasi yang berlangsung antara para pihak terkait yang menjalankan pembangunan infrastruktur desa. Terkait kondisi demikian, diperlukan komunikasi pemerintah desa yang baik dan ideal, memberikan pemahaman informasi terkait pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan, jembatan dan drainase, sehingga pembangunan tersebut dapat tercapai, bermanfaat bagi masyarakat serta mensejahterakan masyarakat desa sampali.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan judul skripsi: *“Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka beberapa masalah yang di identifikasikan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masih belum terlaksanakan dengan baik.
2. Keterbatasan dan ketidakmerataan informasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan infrastruktur.
3. Rendahnya pasrtisipasi masyarakat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan infrastruktur.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi pemerintah Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

2. Kendala yang dialami masyarakat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam partisipasi pembangunan infrastruktur.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi komunikasi pemerintah Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur?
2. Kendala apa saja yang dialami masyarakat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam partisipasi pembangunan infrastruktur?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami masyarakat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam partisipasi pembangunan infrastruktur.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan informasi kepada peneliti/penulis lain atau sebagai bahan acuan dan referensi tambahan pada penelitian selanjutnya serta untuk memperluas pemahaman pengetahuan penulis mengenai Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa yang telah didapatkan dibangku kuliah dalam melakukan penulisan karya ilmiah seperti riset. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang manfaat penelitian ilmiah.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian penambah pengetahuan, informasi, serta acuan referensi terhadap mahasiswa mengenai Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan positif kepada pemerintah, terkhusus mengenai Strategi Komunikasi Pemerintah Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian penambah informasi kepada masyarakat Indonesia, dalam hal praktik Strategi Komunikasi Pemerintah Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.